

KORUPSI DI INDONESIA DAN SEJARAHNYA

Oleh : Abdul Muis

Abstract

Corruption is a social phenomenon has existed since the era of the history of Egyptian, Babylonian, Hebrew, Indian, Chinese, Greek, and Ancient Rome. Corruption on the surface appear as a problem. From start to tarap simple to the very modern. Various efforts have been made, law enforcement officials made various efforts to be able to cope. But along with the development of time Korupsipun growing. Including Indonesia Corruption in our country and the day rather than getting lost, it became increasingly greater amounts and fantastic, with the number of players who more and more and congregation. Where did it from starting low-level employees to senior officials, civilian and military officials. This is an emergency that must be taken seriously. Because corruption is so diverse. If not immediately anticipated it will take effect very broad. Because of 151 cases of official corruption that involved 17 people the law was an official of the Governor. Not to mention a former minister, a former member of Parliament and who are still serving members of Parliament.

Keywords : Corruption, Law Enforcement, Justice

Reformasi sudah 12 tahun, belum menunjukkan adanya suatu perubahan, bahkan semakin hari semakin tidak jelas kemana arah perubahan ini. Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudoyono semangat untuk memberantas korupsi juga

tidak pernah surut. Beberapa kali Presiden menyatakan untuk memimpin sendiri pemberantasan korupsi di negeri ini, namun seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri "Gamawan Fauzi" menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak

cukup hanya dengan dipidatokan. Butuh aksi nyata, tindakan konkrit, serta komitmen penuh. Masyarakat yang masih bersifat permisif terhadap koruptor juga harus dibuang jauh-jauh. Ini perlu perjuangan bersama.

Reformasi yang kita bangun tahun 1998 sudah berjalan hampir 12 tahun, namun cita-cita untuk menjadikan Negara dan bangsa ini bebas dari korupsi masih merupakan impian yang belum jelas kapan akan terwujud. Karena setiap hari berapapun banyak kasus korupsi yang terjadi di berbagai daerah dan di berbagai lembaga pemerintahan, baik di media cetak, maupun di media elektronik. Semua memuat informasi korupsi, pejabat tinggi, mantan menteri, Gubernur, mantan Gubernur, Bupati, Walikota mantan Bupati/Walikota, mantan Dirjen, Jendral Aktif, Jendral purnawirawan, Kepala Dinas, Jaksa, bahkan Hakim juga terlibat, jadi tiada hari tanpa korupsi, sidang kasus korupsi hampir digelar setiap hari.

Belum lagi kalau mendengar pernyataan Menteri Dalam Negeri kita "ada 155 pejabat -17 di antaranya adalah seorang Gubernur tersangkut kasus hukum", ini sungguh amat mengejutkan kita. Lalu apa artinya reformasi tahun 1998 yang sama-sama kita bangun. Apa makna jargon dan kampanye anti korupsi kalau akibatnya hampir separuh pemimpin daerah dari 33 provinsi tersangkut kasus korupsi. Orde Baru yang dituding biang korupsi telah berakhir. Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 yang memberikan semangat baru bangsa yang menciptakan pemerintahan yang bersih serta

bebas korupsi dan kolusi dilahirkan melalui perjuangan keras mahasiswa dan masyarakat. Pemerintahan otoriter telah digantikan dengan demokrasi multi partai dan *system* pemilihan langsung.

Ada hal yang mengejutkan akhir-akhir ini, yaitu seorang Bupati yang baru saja ke luar dari penjara setelah selesai menjalani hukuman dielu-elukan oleh masyarakat pendukungnya. Mereka tidak menganggap Bupati itu bersalah, mereka menganggap Bupati tersebut apes saja atau sial. Bupati tersebut masih memiliki status sosial yang tinggi, dihargai, disegani, dicintai masyarakatnya. Dengan demikian sikap masyarakat ini ikut mendukung terhadap *banalisasi* korupsi. Mengapa ini bisa terjadi, bagaimana kalau korupsi di Negara kita terus berlanjut. Seorang Oscar Arias Sanchez penerima hadiah Nobel dari Kosta Rika mengatakan "Korupsi yang terus berkepanjangan hanya akan membuat rakyat frustrasi dan bisa menyebabkan kelumpuhan demokrasi".

Apa Sebenarnya Korupsi Itu?

Korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, kemudian apa itu korupsi dan mengapa bisa terjadi korupsi? Sejak awal kehidupan manusia hidup bermasyarakat, tatkala organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul manusia sudah direpotkan oleh gejala yang namanya "korupsi", yaitu sudah beberapa ribu tahun yang silam, yang ditentukan oleh berbagai faktor. Dalam catatan kuno mengenai masalah ini menunjuk

pada penyuaipan terhadap para hakim, para pejabat pemerintah. Pada jaman Babilonia Hammurabi tahun 1200 Sebelum Masehi telah memerintahkan kepada seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki suatu perkara penyuaipan. Kemudian Shamash, seorang raja Assiria (sekitar tahun 200 Sebelum Masehi) menjatukan pidana kepada seorang hakim yang telah menerima uang suap.

Seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam Satu kalimat. Yang mungkin ialah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala lain yang bukan korupsi. Inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Rumusan korupsi yang dikemukakan oleh Brooks adalah "dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi"

SH Atlas dalam bukunya "korupsi" menjelaskan mengenai korupsi ditinjau dari segi tipologi, dibagi dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu :

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*); yaitu adanya suatu kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya. Contoh seseorang diberi proyek melalui tender karena sudah membayar sejumlah uang. Ini banyak terjadi.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*); adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuaip guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang, dan hal-hal yang diharganya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*); ialah pemberian barang atau jasa tanpa ada ketalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. Contoh lain seperti jika kita mendukung atau menyumbang seorang calon gubernur dengan harapan nanti kalau ia jadi gubernur memberikan sejumlah proyek kepada kita. Yang jumlahnya melebihi apa yang pernah kita bantu.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*); atau biasa disebut dengan nepotisme, adalah penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. Lebih banyak seperti karena kekerabatan ia memasukan seseorang untuk bekerja di kantornya padahal orang tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk menduduki suatu jabatan tersebut. Karena tidak sesuai

dengan pendidikan dan pengalamannya.

5. Korupsi defensif (*defensive corruption*); yaitu perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri dari ancaman-ancaman seperti pengusaha yang agar kegiatan usahanya lancar dia membayar orang-orang preman untuk mempengaruhi orang lain agar tidak mengganggunya.
6. Korupsi Otogenik (*autogenic corruption*); Korupsi jenis ini merupakan... Isi pak muis.....
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*). Korupsi jenis ini tidak langsung berhubungan dengan uang atau imbalan. Seperti menyewa penjahat untuk mengusir pemilih yang jujur dari tempat pemilihan suara. Atau membayar konstituen untuk memilih dirinya.

Pembedaan jenis-jenis korupsi seperti di atas sangat penting, karena untuk menghindari kerancuan yang akhirnya hanya membuang-buang waktu saja. Seperti jenis korupsi transaktif, pemerasan, dan defensif. Ketiga jenis ini harus benar-benar dapat dibedakan agar tidak terjadinya suatu kerancuan. Contoh kerancuan yang dimaksud adalah : para penarik pungutan yang serakah, kemudian penyusunan adalah sarana yang paling praktis untuk mendapatkan persamaan dalam konsep modern seperti kebebasan politik. Kemudian hak pilih, otonomi daerah, prakarsa perorangan, dan perlindungan

lembaga tradisional terhadap otoritas negara yang sewenang-wenang.

Pengaruh-pengaruh Korupsi

Pengaruh Korupsi terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa sangat sedemikian besar, bukan saja bidang sosial budaya, tetapi kepada bidang ekonomi serta psikologi masyarakat akan berubah. Contoh seperti Negara-negara Afrika, Negara-negara terkebelakang lainnya. Mereka miskin, serba kekurangan, pendidikan masyarakat sangat tertinggal dari Negara-negara lainnya. Padahal Negara mereka sangat kaya, banyak sumber kekayaan alamnya. Tetapi penguasanya korup dimana sumber kekayaan yang dijual kepada pihak asing.

Rakyat yang miskin dapat menyaksikan tanda-tanda kemakmuran negaranya, karena adanya gedung pencakar langit, hotel-hotel besar, mobil-mobil mengkilat, rumah yang serba nyaman, kehidupan yang serba mewah, toko-toko perhiasan di pajang dan keluarga yang korup memamerkan kemewahan di mana-mana. Harga-harga barang pokok semakin membumbung tinggi bahkan terkadang langka diperedaran atau di pasaran. Karena barang kebutuhan pokok ditimbun dan dimonopoli atau dikirim ke luar negeri. Akibatnya banyaknya terjadi kematian di sana-sini. Contoh lain adanya bantuan-bantuan yang diselewengkan, dicuri oleh orang-orang korup sehingga tidak sampai kepada sasarannya. Ini sangat memprihatinkan seperti di Afrika Barat yang menunjukkan ketidakadilan yang disebabkan oleh

praktik korupsi, seperti di Rumah-rumah sakit dimana para pasien harus membayar juru rawat untuk mengembalikan pispot. Para dokter harus disuap. Para pasien yang tidak mampu membayar akan disuntik dengan air yang diberi zat pewarna. Obat-obatan dicuri dari apotek, jadi hampir setiap aktivitas membutuhkan uang suap.

Sebuah contoh misalnya pada saat terjadinya kekeringan air di Accra, Ghana, pada tahun 1979 waduk air Ashiaman sama sekali kering, Katup yang dibuat dari beton tidak dipelihara selama bertahun-tahun. Akhirnya diperbaiki oleh perusahaan Italia katup tersebut dengan pengelasan alat modern. Akhirnya pipa air dapat diperbaiki dan pembagian kembali dilakukan. Akibat kekurangan air tersebut akhirnya Ghana menjadi wabah penyakit di sana sini yang menjadi malapetaka nasional. Akibatnya menyebarkan bau dimana-mana. Krisis tersebut betapa tidak mampunya pemerintahan militer dalam menangani merbagai masalah di Ghana.

Pada bulan Juli 1978, Accra mengalami kekurangan bensin, sehingga pengangkutan jadi macet. Sumber keuangan pemerintah mengering sehingga timbul masalah pembayaran untuk minyak mentah yang akan diolah di kilang-kilang minyak Ghana. Karena dana pemerintah dihabiskan dan dikelola secara sembrono untuk hal-hal yang tidak penting dan tujuan-tujuan yang korup.

Akibat korupsi dan salah atur di Ghana, dituturkan dalam buku

“Oquaye”. Seorang pedagang India, bekerjasama dengan orang-orang kelas atas, mengeruk kekayaan Ghana sebesar \$ 20 juta. Tatkala Acheampong dipecat dari jabatannya, Jaksa Agung berusaha keras dan gagal untuk membawa kembali pedang ini ke Ghana. Sikap pemerintah sepertinya masa bodoh terhadap kepentingan masyarakat, merupakan gejala pokok masyarakat yang korup. Sikap masa bodoh itu sangat membebani kehidupan, sumber daya dan penghidupan manusia.

Cerita lain adalah para Dokter mengambil keputusan hanya akan merawat penderita yang gawat penyakitnya saja sebagai protes terhadap kurangnya persediaan alat kedokteran secara terus menerus, seperti alat penyuntik, jubah dokter, obat penangkal infeksi dan perlengkapan-perengkapan penting lainnya. Para perawat bekerja selama dua belas jam sehari tanpa mendapat imbalan untuk dinas malamnya. Fasilitas kantin tidak tersedia. Para perawat banyak yang melakukan mogok kerja. Beberapa pasien meninggal, yang apabila dirawat dengan baik sebenarnya masih dapat diselamatkan. Beberapa pasien dikirim ke rumah sakit tentara dan polisi, kematian-demi kematian terus berlanjut. Masyarakat semakin sinis terhadap ketidakpedulian pemerintah, yang akhirnya membawa efek yang sangat luas kepada sendi-sendi kehidupan.

Ketidapedulian disertai dengan sinisme merasuk menjadi sikap masyarakat terhadap kekuasaan

pemerintah dan segenap segi kehidupan pada umumnya. Sikap masa bodoh ini mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat bahkan sampai ke kampus. Dimana sebuah kampus yang sudah kejangkitan wabah sikap masa bodoh mungkin masih tetap menjalankan aktivitas eksternal dan akademis. Perkuliahan diselenggarakan, sidang skripsi dan wisuda diselenggarakan, rapat-rapat diadakan, seminar-seminar dijalankan. Namun demikian, semangat lembaga telah lumpuh, seperti nuansa akademis dalam lingkungan masyarakat akademis hampir pudar. Perhatian intelektual kurang, pendidikan dosen untuk meningkatkan kemampuan akademiknya kurang, semangat dosen untuk mendapatkan buku bacaan sulit karena tidak ada dana untuk membeli buku yang akhirnya semangat untuk mengajarpun menjadi lemah.

Korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh di dalam birokrasi. Karena berakibat kepada seluruh sendi-sendi kehidupan. Adalah dongeng belaka jika ada yang mengatakan korupsi menyebabkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Dipandang dari orang yang melakukan korup adalah efisien, ini adalah untuk menutupi kesalahan atau kelemahannya. Contoh lain uang suap yang diberikan oleh suatu perusahaan adalah mengurangi efisiensi pemerintah. Karena membuatnya tidak peduli terhadap alternative harga yang lainnya yang lebih realistis dan lebih rasional. Keuntungan yang diterima oleh perusahaan adalah merupakan

kerugian besar bagi pemerintah atau bagi anggaran Negara.

Contoh lain kasus penjualan pesawat terbang oleh Lockheed kepada pemerintah Indonesia yang menaikkan uang komisinya pada tahun 1985. Bagaimana agar pesawat terbang yang dijual kepada pemerintah Indonesia harganya dinaikan secara tajam. Harga dasar sebuah jetstar, pesawat terbang buatan Lockheed adalah US \$ 1.700.000, agen Indonesia mengambil komisi sebesar US \$ 74.000, sejumlah US \$ 100.000, ditambahkan lagi. Pada penjualan terakhir untuk membantu agen Indonesiannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu. Kesemuanya dijumlahkan ke dalam harga penjualan pesawat keempat yang diusulkan, disarankan pula agar harganya dinaikan lagi sebesar US \$ 100.000. Dengan demikian, sebuah pesawat terbang yang seharusnya berharga US \$ 1.700.000 menjadi harga US \$ 1.900.000. Ini atas kehendak pihak pembeli dengan persetujuan diam-diam dengan pihak penjual. Perusahaan juga menjadi pusing dibuatnya, karena harga yang diminta pembeli semakin dinaikan dan sangat tidak sesuai dengan kenyataan.

Kasus lain yang terjadi akhir-akhir ini adalah pejabat Dirjen, Gubernur yang tersangkut pengadaan damkar (pemadam kebakaran), sampai kepada Bupati/Walikota sampai Kepala Dinas. Jadi banyak kasus pejabat yang menyalahgunakan anggaran belanja daerah (APBD) kini semakin marak di seluruh wilayah Indonesia di 33 provinsi yang

ada dengan berbagai kasusnya. Seperti pengadaan barang, pembelian lahan untuk suatu proyek perkantoran atau lapangan terbang, kendaraan dinas yang kesemuanya di mark up. Menaikan harga yang tidak sesungguhnya, ini banyak sekali terjadi belakangan ini.

Dari berbagai contoh tersebut jelas bahwa korupsi seperti itu akan memporakporandakan keuangan Negara yang akibatnya akan menyulitkan ekonomi negara secara keseluruhan, oleh karenanya sering terdengar bahwa Negara mengalami keadaan defisit anggaran, yang sebenarnya adalah tidak mungkin terjadi kalau penyelenggara Negara melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Atau sering pula kita mendengar harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikan sekian persen karena anggaran subsidi yang tersedia semakin terbatas. Hal ini pula sebenarnya karena banyaknya ulah para pejabat yang melakukan pemborosan anggaran mengabaikan efisiensi, belum lagi banyaknya mapia di dalam tubuh Pertamina yang mengakibatkan harga bahan bakar minyak (BBM) semakin meningkat. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kenaikan barang-barang yang lainnya. Seperti barang Sembilan bahan pokok yang harganya terus melonjak, akibat naiknya bahan bakar minyak. Ini sering kali terjadi di Negara Indonesia ini yang menyebabkan inflasi yang cukup tinggi.

Daftar Pustaka :

- Alatas, Syed Hussein, 1987, *Korupsi*, LP3 ES, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moenir, HAS, 2000, *Manajemen Pelayanan Umum*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.